

9. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Proses penyusunan Renstra tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam Perubahan Renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;

- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. Analisis gambaran pelayanan;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisis isu strategis;
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal rpjmd;
 - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah; dan
 - g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
 3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

Pada saat ini Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021-2026 mengalami perubahan karena:

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdampak pada pemutakhiran kode seluruh sub kegiatan dan perubahan nomenklatur dan indicator sub kegiatan.
2. Tindaklanjut evaluasi SAKIP tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan serta evaluasi target kinerja tujuan dan sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026;
23. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2021-2026 untuk memberikan arahan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan, dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran setiap akhir tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan perangkat daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis perangkat daerah.
3. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama 5 (lima) tahun yang merupakan pedoman dalam pencapaian visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar melalui sumber pembiayaan APBD.
4. Sebagai instrumen pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar.
5. Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kota Blitar pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bab iii	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV	Tujuan dan Sasaran
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab V	Strategi dan Kebijakan
Bab VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII	Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

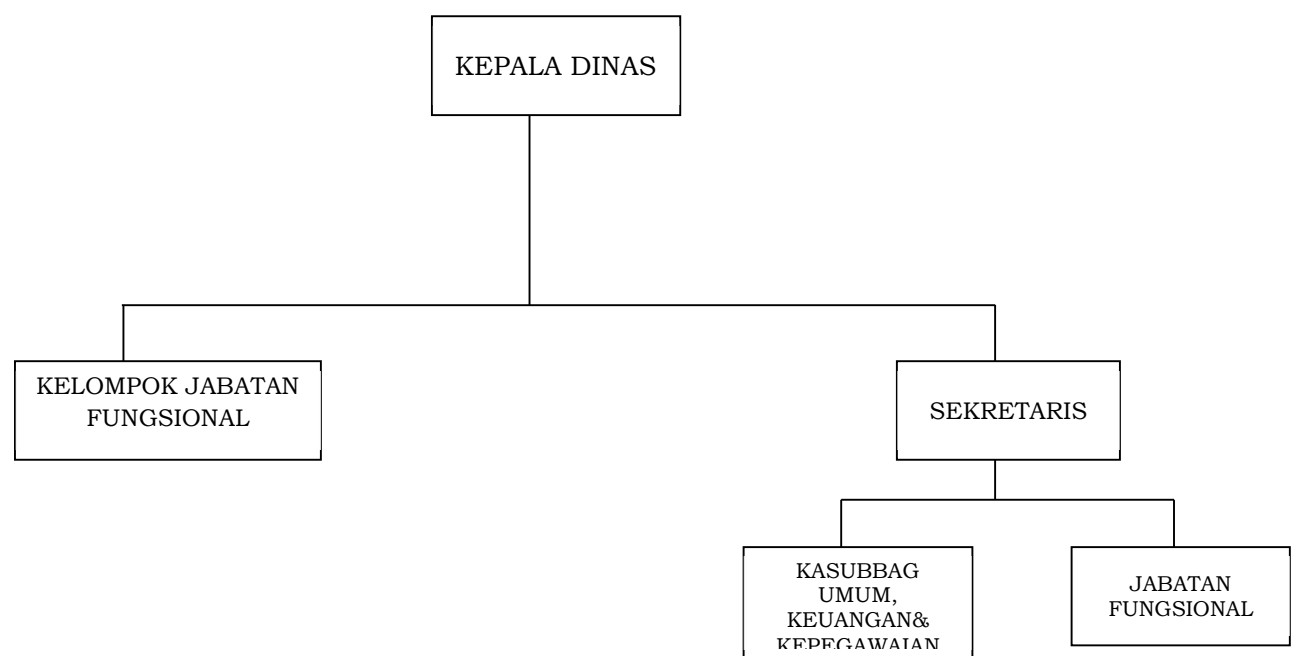
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyusunan kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Penyusunan kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
7. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
9. Penetapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan dinas;
10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar

Uraian tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan program dan kepegawaian, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan serta penatausahaan barang dilingkungan dinas. Untuk menjalankan tugas tersebut, sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan penanaman modal dan pelaksanaan bidang pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan perataturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
 - d. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - f. Pengkoordinasian dan penyusunan Recana Kerja Anggaran (RKA);
 - g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - h. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang dilingkungan Dinas;

- i. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
- m. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- p. Fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- r. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- s. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- u. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- v. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang urusan penanaman modal dan pelaksanaan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- w. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- x. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- y. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- z. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- aa. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
- bb. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Manuasia

Sumber daya aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Secara kuantitatif Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar memiliki pegawai yang cukup memadai, yaitu sebanyak 43 orang terdiri dari 26 orang PNS dan 17 orang Non PNS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Daftar Pegawai Menurut Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)	
			L	P
1	Kepala Dinas	II/b	1	
2	Sekretaris Dinas	III/a	1	
3	Kasubbag.	IV/a		1
4	Analisis Kebijakan Ahli Madya		1	1
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda		1	4
6	Fungsional Umum / pelaksana		8	8
7	Non PNS / PTT & THL		14	3

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)	
			L	P
	Jumlah		26	17
	Total		43	

Tabel 2.2.2 Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	
		L	P
1.	S2	3	
2.	S1	9	8
3.	D3	2	4
4.	D2		1
5.	SLTA	13	2
6.	SLTP		1
	Jumlah	27	16
	Total	43	

2) Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar terletak di Jl. Jawa No. 64b memiliki gedung yang cukup memadai karena dilengkapi dengan Tempat Parkir, Ruang Merokok, Ruang Pelayanan, Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Tempat Bermain Anak/Play Ground, KaTaMuYaMas (KafeTatap Muka Pelayanan Masyarakat) dan Ruang Menyusui. Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.4 Daftar Sarana Prasarana Kantor
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar
Tahun 2021

No.	Nama Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	3 unit	Baik
2	Sepeda motor	8 unit	Baik
3	Komputer/ PC	25 unit	Baik
4	Laptop	5 unit	Baik
5	Printer	27 unit	Baik
6	Meja Kerja	27 unit	Baik
7	Meja Pelayanan	1 set	Baik
8	Meja Rapat	1 set	Baik
9	Kursi Hadap Pelayanan	6 buah	Baik
10	Kursi Tunggu pelayanan	6 buah	Baik
11	Kursi rapat	40 buah	Baik
12	Televisi	6 buah	Baik
13	Sound system	1 unit	Baik
14	Rak Arsip	15 buah	Baik
15	AC Split Dinding dan Standing Floor	17 buah	Baik
16	Wastafel cuci tangan stainlees dan batu kran	3 unit	Baik
17	Lemari Display	2 buah	Baik
18	Microphone/ Wireless MIC	3 set	Baik
19	CCTV	11 unit	Baik
20	Sofa Ruang Katamuyamas dan Ruang Laktasi	3 set	Baik
21	Meja Kursi tamu	3 set	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran 1 (pertama) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar pada periode Renstra sebelumnya (2016-2021) adalah Meningkatnya nilai investasi daerah dengan indikator kinerja persentase peningkatan nilai investasi daerah.

Nilai investasi mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2018, bahkan pada tahun 2018 tersebut kenaikan mencapai yaitu 105 % dari target yang ditetapkan. Hal tersebut karena pada bulan Agustus OSS (Online Single Submission) mulai diterapkan sehingga baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang sudah terdaftar dan memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) mendaftarkan usahanya melalui OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada tahun 2018 Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penetapan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Perubahan tersebut adalah Sasaran 1 menjadi Meningkatnya jumlah investor dengan indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah investor, yang mana capaiannya mengalami kenaikan pada tahun 2019 namun terjadi penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut akibat dari pandemi covid19 yang mempengaruhi sektor usaha. Banyak usaha yang tidak mampu bertahan atau tidak beroperasi selama masa pandemi.

Sasaran 2 (Kedua) Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan indikator kinerja Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan perizinan. Hasil dari pengukuran kepuasan masyarakat (pemohon izin) menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Capaian tersebut selaras dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang juga mengalami peningkatan, yang berarti bahwa pelayanan perizinan kepada masyarakat semakin baik.

Sedangkan untuk kinerja program mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat tercapai sesuai target bahkan lebih. Namun ada juga yang tidak tercapai, yaitu pada indikator Jumlah PMA/PMDN yang hanya tercapai 42,36% dari target pada tahun 2020. Hal tersebut sama seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu akibat pandemi covid19 yang mempengaruhi sektor usaha di Kota Blitar bahkan seluruh Indonesia. Berikut secara detail capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
Kota Blitar**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke (%)				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai investasi (milyar rupiah)				161,6	163,2	164,8	166,4	166,67	164,04	336,27	265,86	167,1	258,46	101,51	206,05	161,3	100,4	155,1
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				72,55	73,1	73,65	74,2	74,76	71,90	72,21	72,06	69,53	69,96	99,1	98,78	97,8	93,71	93,58
3	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan				Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Baik (83,15)	Baik (85,89)	Baik (83)	Baik (88,82)	100	100	100	100	100
4	Persentase peningkatan target investasi daerah				0,52	0,99				2,03	105				390,38	10605,3			
5	Persentase peningkatan jumlah investor						2,38	2,54	2,68			57,4	-60,4	102			2413,7	- 2378	3804,15
6	Persentase tenaga kerja bekerja yang bekerja di sektor formal				52,2	53				80,59	77,49				154,39	146,21			
7	Persentase tenaga kerja bekerja yang bekerja di sektor informal				47,8	47				19,41	22,51				40,61	47,89			
8	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja						0,35	0,36	0,39			-1,3%	2,52	0,89			-371,4	700	228,66
9	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan perizinan				75	80	83	86	89	76,03	88	88,3	96,77	98,7	101,4	110	106,4	112,5	110,9

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	5.851.153.296	7.180.240.520	9.192.335.705	6.520.230.615	6.776.831.759	4.911.960.080	6.520.157.985	8.041.766.504	5.693.099.742	6.138.274.759	83,95%	90,81%	87,48%	87,31%	90,58%	15,82%	24,97%
Belanja Tidak Langsung	2.949.650.846	2.987.538.370	3.897.405.611	3.454.147.417	3.592.281.299	2.099.757.462	2.462.414.793	3.094.876.393	2.951.784.759	3.471.629.227	71,19%	82,42%	79,41%	85,46%	96,64%	21,79%	65,33%
Belanja Pegawai	2.949.650.846	2.987.538.370	3.897.405.611	3.454.147.417	3.592.281.299	2.099.757.462	2.462.414.793	3.094.876.393	2.951.784.759	3.471.629.227	71,19%	82,42%	79,41%	85,46%	96,64%	21,79%	65,33%
Belanja Langsung	2.901.502.450	4.192.702.150	5.294.930.094	3.066.083.198	3.184.550.460	2.812.202.618	4.057.743.192	4.946.890.111	2.741.314.983	2.666.645.532	96,92%	96,78%	93,43%	89,41%	83,74%	9,76%	-5,18%
Belanja Pegawai	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang Dan Jasa	2.859.328.400	3.632.146.435	4.128.685.694	2.242.442.099	3.010.999.260	2.770.652.618	3.508.119.192	3.800.224.598	1.927.753.233	2.498.223.431	96,90%	96,59%	92,04%	85,97%	82,97%	5,3%	-9,83%
Belanja Modal	42.174.050	560.555.715	1.166.244.400	823.641.099	173.551.200	41.550.000	549.624.000	1.146.665.513	813.561.750	168.422.101	98,52%	98,05%	98,32%	98,78%	97,04%	311,51%	305,35%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Mal Pelayanan Publik mendorong Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan MPP yaitu 1) memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; (2) meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia (Permenpan Dan RB No. 23 Tahun 2017, pasal 2).

MPP Kota Blitar terletak di Jl. HOS.Cokroaminoto Nomor 1 menempati eks. gedung Graha Patria. Pembangunan MPP dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan biaya sebesar Rp 3.358.005.551,- (termasuk biaya perencanaan, pengawasan dan reviu perencanaan pekerjaan tahap 2) dan Tahun 2024 dengan perencanaan biaya sebesar Rp. 3.344.212.951,-.

Pelayanan publik tidak hanya dituntut menjadi lebih baik namun juga lebih cepat sehingga inovasi terus dikembangkan. Seperti belum lama ini yaitu pada tanggal 20 Juni 2023 di Jakarta telah diluncurkan MPP digital nasional oleh Wapres Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya Wapres menyampaikan "MPP digital hendaknya mampu mengintegrasikan proses bisnis pelayanan lintas sektor, standarisasi layanan, penggunaan teknologi informasi yang mudah dan murah, serta literasi digital". Menindaklanjuti hal tersebut DPMPTSP Kota Blitar juga merencanakan pengembangan MPP dengan digitalisasi.

Rumusan peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dalam meningkatkan pelayanannya kedepan:

Peluang:

- Adanya embrio mall pelayanan publik di Blitar Square sehingga memberikan pilihan tempat bagi masyarakat dalam mengurus perizinan.
- Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/pemohon izin.

Tantangan:

- Di era milenial yang serba On Line saat ini, pelayanan perizinan pun diharapkan dapat diakses secara On Line sehingga diperlukan dukungan, baik anggaran maupun kebijakan untuk dapat mewujudkannya.
- Melaksanakan pembangunan mall pelayanan publik.
- Menciptakan inovasi dalam menarik investor dan memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

1. Potensi investasi Kota Blitar belum diketahui seluruhnya oleh calon investor.
2. Belum optimalnya promosi investasi.
3. Pelayanan perizinan daerah (Ijin pemakaian kekayaan daerah, ijin reklame, ijin GOR dll) belum dapat diakses secara OnLine.
4. Pelaku usaha belum tertib dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tersebut adalah:

- Promosi investasi belum optimal.
- Belum adanya kebijakan insentif penanaman modal bagi investor.
- Belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang.
- Belum tersedianya sistem informasi layanan perizinan yang terintegrasi dengan seluruh OPD teknis.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah “KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”. Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu “Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup”.

Adapun Misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
- Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
- Misi 3: Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital.
- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar adalah pada misi III (ketiga), yakni: “Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital”. Sedangkan program-program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya misi tersebut adalah :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 4) Program Pelayanan Penanaman Modal

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

- (1) Meningkatnya realisasi penanaman modal.
- (2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal.
- (3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani.

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan BKPM dalam mencapai sasaran strategis tersebut adalah:

- (1) Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.

Adapun strategi yang ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah:

- (a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (investor needs).
- (b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.
- (c) Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal.
- (d) Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal.
- (e) Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal.
- (f) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (g) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- (2) Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonom yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun strategi yang ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah:

- (a) Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja.
- (b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal.
- (c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi.
- (d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar.
- (e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.
- (f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar.
- (g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 - 2030. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar tidak terkait dengan lokasi/penempatan fasilitas tertentu atau diatur dalam ketentuan penataan ruang sehingga tidak memerlukan Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan data spasial lainnya terkait tugas/pelayanan/ wilayah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah. Sedangkan isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kota Blitar yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yaitu berdasarkan struktur usia penduduk Kota Blitar sesuai prediksi nasional pada kisaran tahun 2015 sampai 2025 diperkirakan akan terjadi suatu kondisi dimana penduduk pada usia produktif sangat besar persentasenya jika dibandingkan penduduk usia non produktif. Hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri jika pemerintah tidak

bisa menyediakan lapangan kerja yang memadai karena angka pengangguran akan tinggi.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS dilakukan sebagai upaya perwujudan penataan ruang Kota Blitar yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan Kota Blitar ke arah yang semakin terkendali. Hal tersebut tidak mempengaruhi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dalam memberikan pelayanan di bidang penanaman modal.

3.5 Penentuan isu-Isu Strategis

Atas dasar permasalahan pelayanan perangkat daerah yang ditinjau dari beberapa telaahan diatas, berikut isu- isu strategis yang akan ditangani:

1. Belum terinventarisirnya potensi peluang investasi di Kota Blitar
2. Mengembangkan promosi potensi investasi dengan strategi yang lebih menarik.
3. Meningkatkan kepercayaan calon investor melalui kebijakan penanaman modal.
4. Meningkatkan pembinaan dalam penyusunan LKPM dan mendorong penyampaian LKPM.
5. Meningkatkan pelayanan perizinan melalui pengembangan aplikasi perizinan berbasis web sebagai penunjang aplikasi OSS RBA.
6. Meningkatkan kesadaran perizinan bagi pelaku usaha/investasi di Kota Blitar.
7. Meningkatkan kualitas SDM melalui Bimtek dan/atau Diklat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

Penentuan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar tidak lepas dari desain besar visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2021 – 2026. Secara teknis Tujuan Renstra merupakan Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar mendukung Misi 3 yaitu “Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital”.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah *Meningkatnya nilai investasi daerah*.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam program pembangunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar yaitu *Meningkatnya jumlah realisasi investasi*.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2022 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Realisasi Kinerja				Target Kinerja			
							2020	2022		2023		2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
								Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	Meningkatnya nilai investasi daerah		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Realisasi investasi adalah perhitungan nilai tanah dan bangunan tempat usaha ditambah nilai peralatan dan sarana produksi serta modal usaha dari pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada OSS (<i>Online Single Submission</i>)	Jumlah realisasi investasi Tahun N – jumlah realisasi investasi Tahun N-1/ jumlah realisasi investasi Tahun N-1 x 100%	%	-37,15	0,3	33,57	0,36	12	0,42	0,47	0,53	133,85%
		Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)		Jumlah realisasi investasi tahun berjalan	(milyar rupiah)	167,1	167,2	345,22	167,8	385,06	387	389	391	391
2	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas	Hasil nilai evaluasi SAKIP DPMPSTSP oleh Inspektorat	Nilai	A (84,63)	A (84,8)	A (85,47)	A (84,8)	A (85,66)	A (85,67)	A (85,69)	A (85,71)	A (85,71)

[illegible]

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar dalam mencapai tujuan dan sasaran disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar

VISI			
KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur dan Bermartabat			
MISI III			
Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya nilai investasi daerah	Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Peningkatan kondusivitas iklim investasi	Optimalisasi identifikasi potensi investasi
			Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi
			Peningkatan promosi investasi
			Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Guna mendukung visi misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2021-2026 serta dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar, diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan.
3. Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Secara detail rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerja serta pendanaan tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 disajikan pada tabel 6.1, tabel 6.2 dan tabel 6.3 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulai Perhitungan	Satuan	Data Awal Th 2020	Target kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja PD penanggungjawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar										
2.18	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal										
	TUJUAN Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Jumlah realisasi investasi tahun N - Jumlah realisasi investasi tahun N-1/ Jumlah realisasi investasi tahun N-1 x 100%	%	-37,15	0,30		33,57			
	SASARAN Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	milyar rupiah	167,1	167,2		345,22			
2.18.02	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Jumlah Potensi Investasi yang teridentifikasi Th N - Jumlah potensi Investasi yang teridentifikasi Th N-1 / Jumlah Potensi Investasi yang teridentifikasi Th N-1 x 100%	%	40	45	63.999.950	50	22.479.100	Bid. Penanaman modal	Kota Blitar
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	dokumen	NA	1	63.999.950	0	22.479.100		
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudah.an Penanaman Modal	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang disusun	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang disusun		NA	0	-	-	-		
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun	dokumen	NA	1	63.999.950	0	22.479.100		
2.18.03	Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N - Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N-1/ Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N-1 x 100%	%	NA	40	64.279.000	43	353.716.234	Bid. Penanaman modal	Kota Blitar
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase investor baru yang terverifikasi	Jumlah investor baru yang terverifikasi/ Jumlah investor baru x100%	%	NA	20	64.279.000	60,77	353.716.234		
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penanaman modal yang dilaksanakan	Jumlah kerjasama penanaman modal yang dilaksanakan	kerjasama	2	1	64.279.000	1	353.716.234		
2.18.04	Program Pelayanan penanaman modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	Jumlah izin terbit tepat waktu/ Jumlah izin yang diterbitkan * 100%	%	98,4	99,5	249.973.347	99,53	491.181.131	Bid. Perizinan	Kota Blitar

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulai Perhitungan	Satuan	Data Awal Th 2020	Target kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja PD penanggungjawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	Pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N - pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N-1 / pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N-1 x100%	%	NA	3	249.973.347	57,54	491.181.131		
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan izin usaha yang terverifikasi berkewajiban memenuhi komitmen	Jumlah permohonan izin usaha yang terverifikasi berkewajiban memenuhi komitmen		NA	1.030	44.935.500	1744	138.177.700		
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah izin yang terbit secara tepat waktu	Jumlah izin yang terbit secara tepat waktu	izin	3300	3748	167.714.447	4619	206.334.931		
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah layanan konsultasi dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah layanan konsultasi dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	layanan	3	4	37.323.400	7	146.668.500		
2.18.05	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N - Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N-1 /Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N-1 X 100%	%	NA	75	372.641.850	71,22	301.762.260	Bid. Penanaman modal	Kota Blitar
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM		NA	50	372.641.850	238	301.762.260		
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan monev Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan monev Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		NA	300	75.075.800	320	31.563.650		
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pendampingan dalam hal Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pendampingan dalam hal Laporan Kegiatan Penanaman Modal		72 perusahaan	30	157.366.350	30	187.699.750		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		NA	80	140.199.700	80	82.498.860		
	TUJUAN Meningkatnya tata Kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	A	A (84,8)		A (85,47)			
	SASARAN Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	A	A (84,8)		A (85,47)			
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,33	83,9	4.151.949.349	83,9	3.953.802.809	Sekretariat dinas	Kota Blitar

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulai Perhitungan	Satuan	Data Awal Th 2020	Target kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja PD penanggungjawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar/dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun X 100%	%	100	100	2.107.500	100	12.075.900		
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	3	3	1.390.500	3	1.390.500		
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	dokumen	3	3	717.000	3	717.000		
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kineja Perangkat daerah	Jumlah jenis Evaluasi Kineja Perangkat daerah	Jumlah jenis Evaluasi Kineja Perangkat daerah	dokumen	1	1	0	1	9.968.400		
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar/Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan x 100%	%	100	100%	3.610.996.299	100	3.061.315.116		
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	29	30	3.568.684.299	27	3.059.083.116		
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	dokumen	1	1	42.312.000	1	2.232.000		
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/ Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	%	100	100	205.670.800	100	49.985.600		
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	stel	29	0	5.670.800	0	0		
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah	publikasi	2	2	200.000.000	2	49.985.600		
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Administrasi umum perangkat daerah sesuai standar/administrasi umum perangkat daerah yang tersedia x100%	%	100	100	145.222.200	100	476.240.399		
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	komponen	2	2	2.544.800	2	2.544.800		
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan daan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah peralatan daan perlengkapan kantor yang tersedia	macam	2	2	2.180.700	2	12.310.700		
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	macam	13	8	2.431.700	8	2.431.700		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintah daerah dan program/kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulai Perhitungan	Satuan	Data Awal Th 2020	Target kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022		Unit kerja PD penanggungjawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	macam	30	25	77.376.000	25	342.637.250		
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	327	105		105			
		Jumlah tenaga harian lepas yang terbayarkan gajinya	Jumlah tenaga harian lepas yang terbayarkan gajinya	oarnng		9		9			
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia	cetakan	4	3	12.580.000	3	12.580.000		
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bahan bacaan	2	1	5.400.000	1	5.400.000		
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	rakor	103	20	42.709.000	31	98.335.949		
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar/ penyediaan jasa penunjang urusan yang dilaksanakan x 100%	%	100	100	113.608.000	100	86.944.449		
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah rekening yang terbayarkan	rekening	4	3	113.608.000	3	86.944.449		
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	BMD yang terpelihara sesuai standar/BMD yang terpelihara x100%	%	100	100	74.344.550	100%	267.241.345		
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Unit	10	10	51.678.950	9	62.528.520		
		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	unit	2	2		2			
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	macam	3	3	9.048.400	3	9.025.000		
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	unit	1	1	5.100.000	1	187.170.625		
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	macam	2	2	8.517.200	2	8.517.200		

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar							
2.18	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal							
	TUJUAN 1 Meningkatnya tata Kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP DPMPTSP yang dikeluarkan oleh Inspektorat		84,8 (A)			
	SASARAN 1 Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP DPMPTSP yang dikeluarkan oleh Inspektorat		84,8 (A)	Target program pake rpjmd (renstra sebelum perubahan)		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Nilai	84,2 (Baik)	4.776.576.000	DPMPTSP	Kota Blitar
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar/ dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun X 100%	%	100	2.210.000		
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	1.460.000		
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun berjalan	dokumen	3	750.000		
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar/Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan x 100%	%	100	3.789.512.000		
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang	26	3.747.200.000		
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada tahun berjalan	Dokumen	1	42.312.000		
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	%	100	251.632.000		
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan yang disediakan	paket	3	41.632.000		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	orang	200	210.000.000		
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Administrasi umum perangkat daerah sesuai standar/administrasi umum perangkat daerah yang tersedia x100%	%	100	393.922.000		
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	paket	1	2.672.000		
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakanpada tahun berjalan	paket	4	60.000.000		
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakanpada tahun berjalan	paket	3	6.250.000		
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakanpada tahun berjalan	paket	14	125.000.000		
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakanpada tahun berjalan	paket	1	40.000.000		
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan pada tahun berjalan	dokumen	12	10.000.000		
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	dokumen	25	150.000.000		
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan/ Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan x 100%	%	100	3.607.197.257		
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakanpada tahun berjalan	paket	1	183.104.050		
2.18.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakanpada tahun berjalan	unit	2	66.087.656		
2.18.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakanpada tahun berjalan	unit	1	3.358.005.551		
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar/ penyediaan jasa penunjang urusan yang dilaksanakan x 100%	%	100	119.300.000		
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakanpada tahun berjalan	dokumen	36	119.300.000		
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	BMD yang terpelihara sesuai standar/ BMD yang terpelihara x100%	%	100	220.000.000		
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannyapada tahun berjalan	Unit	10	75.000.000		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliharapada tahun berjalan	unit	42	20.000.000		
2.18.01.2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	0	125.000.000		
	TUJUAN 2 Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Jumlah realisasi investasi th n - Jumlah realisasi investasi th n-1/ Jumlah realisasi investasi th n-1 x 100	%	0,36			
	SASARAN 2 Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah) pada tahun berjalan	Milyar rupiah	167,8			
2.18.02	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Jumlah Potensi Investasi yang teridentifikasi Th N - Jumlah potensi Investasi yang teridentifikasi Th N-1 / Jumlah Potensi Investasi yang teridentifikasi Th N-1 x 100%	%	50%	352.000.000	DPMPTSP	Kota Blitar
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan pada tahun berjalan	Dokumen	1	352.000.000		
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah pada tahun berjalan	Kegiatan usaha	1	352.000.000		
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N - Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N-1/ Jumlah Potensi Investasi yang dipromosikan Th N-1 x 100%	%	45	970.060.000	DPMPTSP	Kota Blitar
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	Jumlah potensi informasi yang dipromosikan/ Jumlah potensi informasi yang ada x100%	%	100	970.060.000		
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota yang disusun	Dokumen	1	970.060.000		
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	Jumlah izin terbit tepat waktu/ Jumlah izin yang diterbitkan * 100%	%	99,50	679.543.000	DPMPTSP	Kota Blitar
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	Pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N - pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N-1 / pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N-1 x100%	%	3	679.543.000		
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada tahun berjalan	Pelaku usaha	1.060	192.908.000		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
					2023			
					K	Rp		
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan KomitmenPerizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal pada tahun berjalan	Kegiatan usaha	3860	361.990.000		
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu pada tahun berjalan	Orang	4	124.645.000		
2.18.05	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N - Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N-1 /Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N-1 X 100%	%	75%	483.400.000	DPMPTSP	Kota Blitar
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM pada tahun berjalan	Perusahaan	100	483.400.000		
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun berjalan	Kegiatan usaha	6	379.950.000		
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun berjalan	Pelaku usaha	200	45.700.000		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pada tahun berjalan	Kegiatan usaha	6	57.750.000		

Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD penanggungjawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	TUKUAN 1: Meningkatkan tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Hasil nilai evaluasi SAKIP DPMPTSP oleh Inspektorat	Nilai	85,67 (A)		85,69 (A)		85,71 (A)		85,71 (A)		DPMPTSP	Kota Blitar
	SASARAN 1: Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Hasil nilai evaluasi SAKIP DPMPTSP oleh Inspektorat	Nilai	85,67 (A)		85,69 (A)		85,71 (A)		85,71 (A)		DPMPTSP	Kota Blitar
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Indeks	84,5 (Baik)	9.119.820.491	84,8 (Baik)	9.575.811.516	85,1 (Baik)	11.054.602.091	85,1 (Baik)	38.678.759.447		
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar/ Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun X 100%	%	100	15.885.000	100	16.679.250	100	17.513.213	100	50.077.463		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	7	1.904.500	7	1.999.725	7	2.099.711	21	6.003.936		
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	5	13.980.500	5	14.679.525	5	15.413.501	15	44.073.526		
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar/ Jumlah Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilaksanakan x 100%	%	100	3.108.774.896	100	3.264.213.641	100	3.427.424.323	100	9.800.412.860		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/bulan	23	3.107.390.896	23	3.262.760.441	23	3.425.898.463	69	9.796.049.800		
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Dokumen	13	1.384.000	13	1.453.200	13	1.525.860	39	4.363.060		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD penanggungjawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pada tahun berjalan											
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/ Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan x 100%	%	100	118.063.800	100	123.966.990	100	130.165.340	100	372.196.130		
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun berjalan	Paket	2	62.761.500	2	65.899.575	2	69.194.554	6	197.855.629		
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	43	55.302.300	43	58.067.415	43	60.970.786	129	174.340.501		
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah administrasi umum perangkat daerah sesuai standar/ Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang harus dilaksanakan x100%	%	100	595.238.080	100	624.999.984	100	656.249.983	100	1.876.488.047		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	24.793.300	1	26.032.965	1	27.334.613	3	78.160.878		
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	5	156.196.300	5	164.006.115	5	172.206.421	15	492.408.836		
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	24.544.880	3	25.772.124	3	27.060.730	9	77.377.734		
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	34	90.100.000	34	94.605.000	34	99.335.250	102	284.040.250		
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	30.291.600	1	31.806.180	1	33.396.489	3	95.494.269		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD penanggungjawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	12	18.000.000	12	18.900.000	12	19.845.000	36	56.745.000		
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Dokumen	25	251.312.000	25	263.877.600	25	277.071.480	75	792.261.080		
2.18.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan/ Jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan x 100%	%	100	4.405.640.351	100	4.625.922.369	100	4.857.218.487	100	13.888.781.207		
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	2	268.255.600	2	281.668.380	2	295.751.799	6	845.675.779		
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	7	703.171.800	5	832.830.390	5	874.471.910	17	2.500.474.100		
2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	1	3.794.212.951	0	3.511.423.599	0	3.686.994.778	1	10.542.631.328		
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar/ penyediaan jasa penunjang urusan yang dilaksanakan x 100%	%	100	719.382.000	100	755.351.100	100	793.118.655	100	2.267.851.755		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dokumen	36	114.096.000	36	119.800.800	36	125.790.840	108	359.687.640		
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	36	605.286.000	36	635.550.300	36	667.327.815	108	1.908.164.115		
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	BMD yang terpelihara sesuai standar/BMD yang terpelihara x100%	%	100	156.836.364	100	164.678.182	100	1.172.912.091	100	1.494.426.638		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	103.518.864	3	108.694.807	3	114.129.548	9	326.343.219		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD penanggungjawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	61	53.317.500	61	55.983.375	61	58.782.544	183	168.083.419		
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	-		
	TUJUAN 2: Meningkatkan nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Jumlah realisasi investasi th n - Jumlah realisasi investasi th n-1/ Jumlah realisasi investasi th n-1 x 100 Akhir periode Renstra dihitung dari jumlah realisasi investasi tahun 2026 - jumlah realisasi investasi tahun 2022/ jumlah realisasi investasi Tahun 2022 x 100%	%	0,42		0,47		0,53		133,85			
	SASARAN 2: Meningkatkan jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Jumlah realisasi investasi tahun berjalan	Milyar rupiah	387		389		391		391			
2.18.02	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Jumlah Potensi Investasi yang teridentifikasi Th N - Jumlah potensi Investasi yang teridentifikasi Th N-1 / Jumlah Potensi Investasi yang teridentifikasi Th N-1 x 100%	%	55	169.021.100	60	177.472.155	65	186.345.763	65	948.838.968		
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan pada tahun berjalan	Dokumen	1	59.021.100	1	61.972.155	1	65.070.763	3	186.064.018		
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal pada tahun berjalan	Dokumen	1	43.762.400	1	45.950.520	1	48.248.046	3	137.960.966		
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN)	Kerjasama	1	15.258.700	1	16.021.635	1	16.822.717	3	48.103.052		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD penanggungjawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			dengan UMKM di daerah pada tahun berjalan											
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia pada tahun berjalan	Dokumen	1	110.000.000	1	115.500.000	1	121.275.000	3	346.775.000		
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun berjalan	Dokumen	1	60.000.000	1	63.000.000	1	66.150.000	3	189.150.000		
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota pada tahun berjalan	Dokumen	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	3	157.625.000		
2.18.03	Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	Jumlah informasi Potensi Investasi yang dipromosikan Th N - Jumlah informasi Potensi Investasi yang dipromosikan Th N-1/ Jumlah informasi Potensi Investasi yang dipromosikan Th N-1 x 100%	%	50	331.435.100	55	400.506.855	60	420.532.198	60	2.186.813.153		
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	Jumlah potensi informasi yang dipromosikan/ Jumlah potensi informasi yang ada x100%	%	100	331.435.100	100	400.506.855	100	420.532.198	300	1.202.474.153		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota pada tahun berjalan	Dokumen	1	331.435.100	1	400.506.855	1	420.532.198	3	1.202.474.153		
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	Jumlah izin terbit tepat waktu/ Jumlah izin yang diterbitkan * 100%	%	99,5	493.394.100	99,6	518.063.805	99,7	543.966.995	99,7	2.484.941.247		
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	Pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N - pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N-1 / pelaku usaha yang mengurus izin usahanya th N-1 x100%	%	3	493.394.100	4	518.063.805	4	543.966.995	4	1.555.424.900		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	Orang	1100	212.157.100	1144	222.764.955	1190	233.903.203	3434	668.825.258		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD penanggungjawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Terintegrasi secara Elektronik	Elektronik pada tahun berjalan											
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik pada tahun berjalan	Orang	4	122.961.500	3	129.109.575	3	135.565.054	10	387.636.129		
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan penanaman Modal	Kegiatan usaha	3976	158.275.500	4135	166.189.275	4300	174.498.739	12411	498.963.514		
2.18.05	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N - Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N-1 /Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM Th N-1 X 100%	%	80	388.764.000	80	427.158.900	85	448.516.845	85	2.120.481.595		
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM pada tahun berjalan	Perusahaan	125	388.764.000	125	427.158.900	125	448.516.845	375	1.282.493.745		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya pada tahun berjalan	Masalah	7	54.864.000	8	64.073.100	9	67.276.755	24	192.371.855		
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada tahun berjalan	orang	300	258.460.900	350	234.938.550	350	246.685.478	1000	705.375.028		
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan	Kegiatan usaha	13	75.439.100	13	128.147.250	13	134.554.613	39	384.746.863		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja PD penanggungjawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha pada tahun berjalan											

Keterangan: kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Program dihitung selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2022 – 2026.
- b. Kegiatan dan Sub Kegiatan dihitung selama 3 - 4 (empat) tahun sesuai hasil pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Visi RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR dan BERMARTABAT”. Sedangkan Misi yang akan dilaksanakan yaitu:

- MISI 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
- MISI 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
- MISI 3: Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
- MISI 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
- MISI 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Memperhatikan visi dan misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar mendukung dalam pencapaian Misi 3 pada Tujuan dan Sasaran berikut:

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar yang mendukung sasaran RPJMD adalah:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2022 – 2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
				2022	2023	2024	2025	2026	Akhir periode renstra
1	Meningkatnya nilai investasi daerah	TUJUAN Meningkatkan nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,3%	0,36%	0,42%	0,47%	0,53%	133,85%
		SASARAN Meningkatkan jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2	167,8	387	389	391	391

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2022 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					
		2022	2023	2024	2025	2026	Akhir periode renstra
1	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	167,2	167,8	387	389	391	391

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar
Tahun 2022 – 2026

No	Indikator Kinerja Kunci	Target Kinerja					
		2022	2023	2024	2025	2026	Akhir periode renstra
1	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,3%	0,36%	0,42%	0,47%	0,53%	133,85%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas serta isu-isu bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan indikator kinerja program dan kegiatan. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar untuk jangka waktu Tahun 2021 -2026. Untuk selanjutnya Renstra akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dan memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar.